

## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal.<sup>(1)</sup> Dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menekankan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara memiliki hak yang melekat untuk menerima layanan kesehatan. Hak ini bersifat umum, mencakup semua penduduk tanpa memperhatikan perbedaan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis, atau faktor lain yang dapat menjadi penyebab adanya diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang memiliki peran signifikan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak adalah posyandu.<sup>(2)</sup>

Posyandu sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bersama masyarakat dengan tujuan memberdayakan mereka serta memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan dasar. Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti keluarga berencana (KB), gizi, imunisasi, penanganan diare, dan kesehatan ibu dan anak (KIA), sebagai bagian dari upaya kolaboratif masyarakat untuk memperluas cakupan layanan kesehatan demi terciptanya keluarga yang bahagia, sehat, dan sejahtera.<sup>(3)</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022, terdapat 216.396 posyandu aktif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jawa barat merupakan provinsi dengan jumlah posyandu terbanyak di Indonesia mencapai 159.228 dan Provinsi Papua barat memiliki jumlah posyandu yang paling sedikit, hanya sebanyak 37 pos. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat

memiliki 4.097 posyandu.<sup>(4)</sup> Kemudian, di Kota Padang jumlah posyandu mencapai 924 posyandu, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 919 posyandu.<sup>(5)</sup>

Salah satu elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan posyandu adalah partisipasi ibu. Keikutsertaan dan peran aktif ibu dalam kegiatan posyandu dianggap sebagai langkah-langkah preventif yang berperan dalam penyelesaian masalah kesehatan anak di Indonesia.<sup>(6)</sup> Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan, secara nasional hanya 68,37% dari masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program posyandu berdasarkan penimbangan rutin berat badan balita di posyandu.<sup>(7)</sup> Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, tingkat partisipasi masyarakat terhadap posyandu diukur menggunakan indikator Sistem Kesehatan Dinas (SKDN). Dari total 392.522 balita yang menjadi target penimbangan, hanya 296.544 balita yang secara aktif mengikuti kegiatan penimbangan di Posyandu. Hal ini menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu sebesar 75,6%. Kota Padang dengan partisipasi sebesar 50,2%, menjadi kabupaten/kota dengan partisipasi masyarakat terendah di Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi yang hanya 49,7%.<sup>(8)</sup>

Rendahnya partisipasi ibu dalam program posyandu sering kali mengakibatkan kurangnya informasi atau edukasi kesehatan mengenai pertumbuhan normal balita. Dampaknya, ibu balita tidak mengetahui perkembangan berat badan anak setiap bulannya serta imunisasi pada anak.<sup>(9)</sup> Menurut penelitian yang dilakukan oleh C. Sukma dan V. Permatasari (2021), ditemukan bahwa setiap tahun, lebih dari 1,4 juta anak meninggal dunia akibat penyakit yang sebenarnya dapat dihindari dengan imunisasi. Selain itu, imunisasi juga melindungi anak dari berbagai penyakit seperti TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Campak, Polio, dan lainnya.<sup>(10)</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan terdapat sekitar 1,7 juta anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi dasar secara lengkap. Wilayah dengan kebutuhan terbesar terletak di Jawa Barat, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada 2022, Kementerian Kesehatan menetapkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi anak.<sup>(11)</sup> Tidak hanya imunisasi, posyandu juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui layanan kesehatan yang mencakup pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi dini penyakit, serta berbagai manfaat lain yang bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak. Sehingga, partisipasi ibu dalam program posyandu menjadi kunci keberhasilan program ini.<sup>(3)</sup>

Namun dalam realitasnya, sejumlah masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas posyandu untuk memonitor pertumbuhan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kesibukan kerja atau kesulitan membawa anak ke posyandu, serta sejumlah faktor seperti pengetahuan, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jarak, aksesibilitas, dan kondisi disabilitas pada ibu. Namun, perhatian terhadap kelompok ibu dengan disabilitas dalam aspek partisipasi di posyandu masih terbatas, khususnya bagi ibu tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan.<sup>(12)</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)*, diperkirakan lebih dari 20 juta perempuan di seluruh dunia adalah penyandang tunanetra, yang merupakan sekitar 55% dari total populasi kebutaan global.<sup>(13)</sup> Sementara itu, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) cabang wilayah Kota Padang mencatat bahwa dari total penyandang tunanetra di Kota Padang, 38,6% di antaranya merupakan kelompok ibu tunanetra.<sup>(14)</sup>

Berdasarkan jumlah perempuan tunanetra tersebut memberikan indikasi potensi rendahnya partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu. Keterbatasan

penglihatan yang dimiliki dan adanya stigma serta intimidasi cenderung menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program posyandu.<sup>(15)</sup> Tantangan lain yang dihadapi oleh disabilitas berasal dari faktor-faktor struktural dan kultural, termasuk kebijakan pemerintah, persepsi masyarakat, dan faktor internal dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kurangnya pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas saat memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang berpartisipasi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh mereka<sup>(16)</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan mereka, ibu tunanetra memerlukan dorongan sosial yang lebih dari pada ibu pada umumnya. Dorongan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mereka.<sup>(17)</sup> Selain itu, akses yang mudah ke layanan publik seperti posyandu penting bagi ibu tunanetra, sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yang menjamin hak individu penyandang disabilitas atas layanan publik tanpa diskriminasi. Pasal ini menetapkan hak mereka atas pendampingan, penerjemahan, dan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan, serta kesempatan yang setara dengan masyarakat lain untuk menjalani perilaku kesehatan yang baik.<sup>(18)</sup>

Dalam kerangka FOAM, keberhasilan individu dalam menerapkan perilaku kesehatan lebih banyak ditentukan oleh FOAM (Focus, Opportunity, Ability, Motivation). Apabila masyarakat memiliki kesempatan, kemampuan, dan motivasi untuk mengadopsi suatu perilaku, maka perubahan perilaku yang lebih positif akan terjadi.<sup>(19)</sup> Ketika ibu tunanetra memiliki aksesibilitas yang baik ke Posyandu (opportunity), pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memanfaatkan layanan kesehatan tersebut (ability), serta motivasi yang kuat untuk ikut serta dalam

kegiatan Posyandu (motivation), maka kemungkinan partisipasi mereka dalam kegiatan Posyandu akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ibu tunanetra memiliki akses, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Posyandu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh N. Jackson (2020), menyatakan bahwa ibu tunanetra sering kali dihadapkan pada ejekan, penindasan, diskriminasi, stigmatisasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang berujung keengganan mereka untuk berpartisipasi ke pelayanan kesehatan. Perempuan tunanetra juga memiliki hak yang sama untuk menikmati hak seksual, reproduksi, dan merawat anak seperti perempuan lainnya, karena menjadi seorang ibu pada dasarnya merupakan pengalaman yang luar biasa. Perwujudan hak tersebut diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang ramah terhadap mereka.<sup>(11,12)</sup>

Furwansyih, dkk (2022) juga menyatakan bahwa sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan yang dikunjungi oleh ibu tunanetra di Kota Padang, tidak menyediakan media informasi yang dapat diakses oleh mereka. Informasi kesehatan kehamilan yang diperoleh oleh ibu tunanetra tersebut kurang memadai karena hanya didapatkan dari informasi minimal yang diberikan oleh bidan di Puskesmas atau praktik bidan. Ibu tunanetra menyatakan bahwa mereka diberi buku Kartu Ibu dan Anak (KIA), namun tidak dapat membaca informasi yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan media dan metode lain sebagai alternatif untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu tunanetra.<sup>(23)</sup>

Dalam survei awal yang dilakukan melalui wawancara dengan seorang ibu tunanetra di dapatkan, bahwa selama periode kehamilan hingga anaknya berusia 3 tahun, ibu tersebut belum pernah berpartisipasi dalam program Posyandu. Selain itu,

ibu tersebut juga tidak mengetahui dimana lokasi Posyandu di wilayah tempat tinggalnya. Petugas posyandu juga tidak pernah melakukan kunjungan dan pemeriksaan kesehatan terhadap anak dari ibu tersebut, sehingga ibu tersebut tidak mengetahui perkembangan fisik anaknya, termasuk berat badan dan tinggi badannya.

Survei awal juga dilakukan dengan seorang ibu tunanetra yang memiliki balita. Melalui wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa anak ibu tersebut memiliki permasalahan gizi. Hal ini terlihat dari perhitungan melalui WHO AntroPlus terhadap berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur yang dimiliki anak tersebut digolongkan sebagai anak dengan *underweight* dan *stunting*.

Hasil survei awal melalui wawancara dengan Ketua PERTUNI Kota Padang mengindikasikan bahwa tidak ada program kesehatan yang secara khusus ditujukan bagi penyandang tunanetra, baik dari segi media yang digunakan maupun metode yang diterapkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala Substansi Promosi Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Padang, yang menyatakan bahwa belum ada kebijakan atau program kesehatan yang ditetapkan untuk penyandang tunanetra, baik dalam hal perencanaan maupun regulasi sebagai panduan dalam penyelenggaraan program kesehatan untuk mereka.

Keberhasilan program Posyandu di Kota Padang sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, termasuk ibu tunanetra. Namun, masih terbatasnya data dan informasi yang mengkaji secara mendalam mengenai tingkat partisipasi ibu tunanetra dalam program Posyandu di Kota Padang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Ibu Tunanetra Dalam Program Posyandu di Kota Padang Tahun 2024”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disajikan pada latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap posyandu di Kota Padang masih rendah, hanya mencapai 50,2% pada tahun 2022. Rendahnya partisipasi ibu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi disabilitas seperti halnya ibu tunanetra. Namun masih terbatasnya data dan informasi yang mengkaji secara mendalam mengenai tingkat partisipasi ibu tunanetra dalam program Posyandu di Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi “Bagaimana faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang tahun 2024?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang tahun 2023.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui secara mendalam faktor pendorong partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang tahun 2023
2. Untuk mengetahui secara mendalam faktor penghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang tahun 2023.



## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait faktor pendorong dan pendorong partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu

### **1.4.2 Aspek Praktis**

#### **1. Untuk Dinas Kesehatan Kota Padang**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait faktor pendorong dan penghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi mereka penyandang tunanetra di Kota Padang.

#### **2. Untuk Puskesmas**

Sebagai ujung tombak layanan kesehatan di masyarakat akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan memperoleh panduan yang lebih jelas dalam merancang program-program kesehatan yang lebih inklusif bagi ibu tunanetra. Hal ini akan membantu Puskesmas dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada individu dengan disabilitas.

#### **3. Untuk Kader Posyandu**

Kader Posyandu akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh ibu tunanetra dalam mengikuti program Posyandu. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan pelatihan khusus bagi kader Posyandu



dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada ibu tunanetra dan keluarganya.

4. Untuk PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia)

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk advokasi PERTUNI dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan dan aksesibilitas bagi individu tunanetra di Kota Padang. Temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung bagi komunitas tunanetra.

5. Untuk Ibu Tunanetra

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi ibu tunanetra dengan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam program Posyandu. Hal ini dapat membantu ibu tunanetra dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kesehatan mereka sendiri dan anak-anaknya.

6. Untuk Keluarga Ibu Tunanetra

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan informasi terkait faktor pendorong dan penghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang sebagai bentuk upaya penyampaian atas pelaksanaan yang dilakukan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi ibu tunanetra dalam program posyandu di Kota Padang tahun 2024. Kota Padang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena tingkat partisipasi ibu dalam program posyandu di Kota Padang masih rendah, hanya mencapai 50,2%. Dalam

survei awal menunjukkan bahwa salah satu kelompok ibu dengan partisipasi terendah adalah ibu dengan penyandang tunanetra. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2023-Mei 2024 dengan melibatkan total 13 informan yang terdiri dari berbagai pihak terkait. Di antaranya adalah 4 orang ibu tunanetra yang memiliki balita, 3 orang anggota keluarga terdekat ibu tunanetra, 3 orang kader Posyandu, 1 orang pemegang program posyandu balita dari Dinas Kesehatan Kota Padang, 1 orang pemegang program Posyandu balita di puskesmas Andalas dan 1 orang pemegang program Posyandu balita di puskesmas Alai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah akses, media, pengetahuan, dukungan sosial, sikap, serta kebijakan dalam upaya menggali informasi secara mendalam terkait faktor pendorong dan penghambat partisipasi ibu tunanetra.

